

	<p>2. Mengembangkan system pendidikan nasional yang terbuka bagi keragaman dalam pelaksanaan.</p>	<p>2. Dibirokratisasi penyelenggaraan pendidikan dan secara bertahap memberikan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan kepada daerah</p>	<p>memadai pada tingkat kabupaten.</p> <p>2. Perampingan birokrasi pendidikan dengan restrukturisasi departemen pendidikan nasional agar lebih efisien.</p> <p>3. Menghapus berbagai peraturan perundangan yang menghalangi inovasi dan eksperimen. Melaksanakan otonomi lembaga pendidikan.</p> <p>4. Revisi atau mengganti UU No. 2 Tahun 1989 dengan peraturan perundangan pelaksanaannya.</p>
<p>3. Proliverasi pendidikan</p>	<p>1. Pendidikan nasional ikut serta dalam mendidikan manusia Indonesia sebagai insane demokratis yaitu yang sadar akan hak-hak serta kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.</p> <p>2. Pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga professional dalam berbagai tingkat diorientasikan terutama pada kebutuhan pasar kerja.</p>	<p>1. Membersihkan birokrasi Deparemen Pendidikan Nasional dari kepentingan-kepentingan politik dengan menerapkan system merit yang professionalisme.</p> <p>2. Menegakkan disiplin yang bertanggung jawab dalam lembaga-lembaga pendidikan.</p> <p>3. Menyelenggarakan pendidikan budi pekerti</p>	<p>1. Depolitisasi pendidikan nasional. Komitmen politik dari masyarakat dan pemerintah untuk membebaskan pendidikan sebagai alat kekuasaan.</p> <p>2. Meningkatkan harkat profesi pendidikan dengan meningkatkan mutu pendidikannya, syarat-syarat profesi disertai dengan renumerisasi profesi pendidik yang memadai.</p>

C. PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Misi utama perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bentuk kegiatan tersebut di atas dinamakan Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam pengembangan perguruan tinggi ada lima hal yang perlu di perhatikan yaitu 1. Kesatuan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 2. Pendekatan kedisiplinan. 3. Kerjasama yang tidak dipaksakan. 4. Keheningan. 5. Kebebasan (Suyatno dkk 2001,105)

1. Harapan berkembangnya perguruan tinggi swasta dapat mempertimbangkan dari berbagai faktor/ indicator: bahwa pendidikan-pendidikan tinggi di Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat drastic yaitu pendidikan tinggi di Negara Asia, karena penuh persaingan yang cukup tajam dan tinggi, maka pendidikan tinggi di Indonesia perlu adanya perubahan dan ditingkatkan mutunya, paradigma baru perlu dirumuskan di ikuti dengan penjabaran misi serta program-program peningkatan mutu, salah satu upaya yang ditempuh dengan cara merajut kerjasama atau networking, yaitu dengan pendidikan tinggi di luar negeri dan berbagai lembaga penelitian yang terbaik.

Visi dan misi perguruan tinggi di era globalisasi ada dua dimensi yaitu: dimensi latealisme, globalisme. Dalam membangun perguruan tinggi memasuki kehidupan global tanpa memperbaiki mutu dan kelembagaannya dari pendidikan, dalam membicarakan misi dan visi pendidikan tinggi negeri maupun swasta tidak lepas dari analisis mengenai dimensi lokal dan mengembangkan dimensi globalnya.

Menurut penglihatan penulis, pada dimensi lokal visi pendidikan tinggi kita mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Akuntabilitas 2. Relevansi 3. Kualitas 4.

Otonomi kelembagaan 5. Jaringan kerja sama.

Pada dimensi global visi disebut mempunyai tiga aspek yaitu: 1. Kompetitif 2. Kualitas 3. Jaringan kerja sama. (PP 60/1999, 43)

Berbagai aspek dari visi pendidikan tinggi tersebut masing-masing dijabarkan di dalam misi atau program yang ingin diwujudkan.

D. DIMENSI LOKAL

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas suatu lembaga pendidikan tinggi berarti sejauh mana lembaga tersebut mempunyai makna dari the share holder lembaga tersebut yaitu masyarakat. Suatu lembaga pendidikan tinggi tidak mempunyai nilai akuntabilitas apabila lembaga tersebut terlepas dari jangkauan atau kebutuhan masyarakat yang dimilikinya. Pendidikan tinggi yang bertahta di atas menara gedung sudah tentu tidak mempunyai akuntabilitas. Didalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas pendidikan tinggi kita, maka perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat didalam pengelolaannya. Hal ini berarti masyarakat merasa memiliki dan oleh sebab itu aktif menunjang pengembangannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka pendidikan tinggi bukan hanya suatu lembaga untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai suatu industri jasa. Dengan kata lain, pendidikan tinggi perlu diperhatikan kebutuhan-kebutuhan perkembangan ekonomi atau tenaga kerja yang diperlukan oleh daerah dimana lembaga pendidikan itu berada. Di dalam hal ini perlu dilaksanakan apa yang disebut prinsip land-grant College seperti yang telah dikembangkan di Amerika Serikat. Land-grant College ditunjukkan kepada orientasi program pendidikan tinggi untuk memenuhi pembangunan suatu daerah hasil kerja sama yang saling menguntungkan antara



masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah federal.

2. Relevansi

Berkaitan erat dengan akuntabilitas pendidikan tinggi ialah relevansi dari program pendidikan tersebut dengan kebutuhan nyata di dalam masyarakat. Di dalam kaitan ini partisipasi dunia kerja dan industri merupakan suatu kaharusan. Seperti yang telah diuraikan, pendidikan tinggi yang tidak mempunyai akuntabilitas sudah pasti tidak mempunyai relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat disini bukan hanya didalam arti ilmu pengetahuan dan tehnologi atau keterampilan, serta kegiatan-kegiatan budaya di dalam suatu lingkungan masyarakat tetapi kebutuhan-kebutuhan moral dan etika serta agama yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

3. Kualitas

Pendidikan tinggi merupakan sumber daya manusia tingkat tinggi yang akan jadi penggerak dan pemimpin masyarakatnya. Untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan tinggi maka diperlukan tenaga-tenaga dosen bermutu. Sejalan dengan itu lembaga pendidikan tinggi harus mampu untuk melaksanakan riset, baik yang diperlukan oleh masyarakat maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Otonomi Kelembagaan

Suatu pendidikan tinggi memerlukan otonomi bukan hanya otonomi dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, tetapi juga otonomi lembaga di dalam masalah-masalah manajemen, penyusunan program dan bujet. Dengan demikian pendidikan tinggi tersebut sebagai lembaga akan bersifat kreatif dan menjadi pelopor perubahan baik di dalam masyarakat sekitar maupun di dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

5. Jaringan Kerja Sama

Pendidikan tinggi bukanlah suatu self sufficient institution. Lebih-lebih lagi di dalam dunia yang terbuka dewasa ini diperlukan kerja sama dalam bentuk kemitraan yang sejajar antara semua pendidikan tinggi. Antara PTN dengan PTN, antara PTS dan PTS dan haruslah merupakan suatu jaringan kemitraan yang saling membantu. Tentu saja didalam kerja sama tersebut perlu dikultivasi persaingan yang sehat sehingga terjadi kemajuan di dalam perkembangan universitas masing-masing. Dengan kerja sama maka sumber-sumber yang tersedia akan saling melengkapi sehingga terjadi efisiensi di dalam system pendidikan tinggi nasional.

Kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi perlu pula dilengkapi dengan kerja sama dengan dunia industri lembaga-lembaga konsumen yang memerlukan tamatan-tamatan pendidikan tinggi.

Kerja sama dibutuhkan juga dengan lembaga-lembaga riset yang ada di dalam dunia industri dan masyarakat. Dengan demikian adanya kerja sama yang saling menguntungkan baik untuk pendidikan tinggi sendiri maupun untuk industri, sehingga keduanya akan dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang produktif dari lembaga-lembaga riset tersebut. Dunia industri dapat memanfaatkan penemuan-penemuan riset dari lembaga-lembaga tersebut, dan sebaliknya lembaga-lembaga riset di pendidikan tinggi akan memperoleh sumber-sumber biaya maupun sumber-sumber tenaga dari lembaga-lembaga riset lainnya. (David 2003, 14)

E. DIMENSI GLOBAL

1. Kompetitif

Dunia yang penuh batas tanpa tantangan dan peluang harus dihadapi sebagai suatu kenyataan oleh pendidikan tinggi. Dengan menawarkan program-

program akademik unggulan dengan taraf internasional maka lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita bukan hanya dapat mengharumkan nama bangsa dan negara, tetapi juga dapat memetik keuntungan-keuntungan lainnya. Demikian pula dengan memiliki daya kompetitif global dari pendidikan tinggi kita, maka tidak perlu kita membuang dana yang besar untuk menggali pengetahuan yang telah diakumulasi oleh pendidikan tinggi lainnya di dunia. Selain itu dengan menawarkan program-program unggulan internasional maka akan terjadi kerja sama internasional dengan negara-negara sahabat. Dan dengan demikian pula kita ikut mewujudkan dan memajukan kerja sama serta perdamaian internasional. Selain itu pendidikan tinggi yang kompetitif yang kita miliki akan memberikan sumbangan bagi kemajuan peradaban dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kualitas

Di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita perlu ditingkatkan fasilitas dan mutu risetnya. Hanya dengan demikian kita dapat meningkatkan kemampuan kompetitif dari lembaga pendidikan kita. Di dalam rangka ini sudah perlu dan mendesak untuk membangun dan mengembangkan universitas riset (research university) dengan tenaga-tenaga dosen yang bermutu tinggi juga menerbitkan hasil-hasil penelitiannya dalam membentuk jurnal ilmiah untuk konsumsi internasional.

3. Jaringan Kerjasama

Apabila pada dimensi local kerja sama diselenggarakan antar universitas baik negeri maupun swasta di dalam negeri, maka di dalam memasuki dunia tanpa batas kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di luar negeri telah merupakan suatu keharusan. Kerja sama dengan universitas terbaik

regional dan internasional dapat berupa pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, menyelenggarakan riset bersama, dan menyusun kurikulum yang lebih baik. Jaringan kerja sama internasional akan memberikan manfaat bagi pengembangan lembaga maupun pengembangan ilmu pengetahuan (Ahmadi dkk, 2000 : 73)

Demikian kedepapan indicator dari visi pengembangan pendidikan tinggi kita memasuki melinium ketiga. Sudah tentu visi yang diterjemahkan didalam misi selanjutnya perlu diwujudkan di dalam program-program pengembangan baik jangka pendek maupun panjang di dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.

F. UPAYA-UPAYA MEWUJUDKAN (KENYATAAN) PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI SWASTA

Masyarakat pengetahuan (know Ledge Society) dimungkinkan adanya revolusi pengelolaan (manajemen) di perguruan tinggi yaitu proses perubahan informasi, teknologi, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Kemajuan tehnologi informasi di dunia pendidikan tinggi bahwa pengetahuan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang berfungsi sebagai perwujudan (kenyataan) perubahan Tri Dharma perguruan tinggi swasta. 1. Pendidikan dan pengajaran 2. Penelitian 3. Pengabdian pada masyarakat.

- a. Teknologi informasi telah memperluas jaringan belajar, sehingga perguruan tinggi swasta bukan satu-satunya pusat tehnologi dan informasi dan sumber belajar, oleh karena itu pendidikan tinggi harus mengembangkan minat, bakat, bagi siswa yang lebih tinggi (besar) untuk mengolah, membangun kreativitas.
- b. Teknologi informasi tidak cukup kalau hanya digunakan sebagai alat baru menggantikan alat lama dalam proses belajarmengajar, sehinggaperguruan tinggi swasta mampu menggunakan teknologi

informasi yang baru untuk mewujudkan (kenyataan) mutu pendidikan tinggi swasta. Seharusnya kurikulum dirancang secara baru, sehingga sasaran yang dituju atau kompetensi yang dibangun dapat tercapai.

- c. Penggunaan teknologi dan pengetahuan merupakan keharusan yang memadai tugas bagi tenaga edukatif di perguruan tinggi tersebut, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen yang pasif.
- d. Teknologi informasi batas-batas geografis dan jarak menjadi tidak baik hal ini dimungkinkan akses lebih besar dan lebih cepat.
- e. Teknologi mengakses focus "mengajar" kepada "belajar"

Teknologi informasi yang baru belum tentu dapat memecahkan masalah pendidikan di perguruan tinggi swasta, namun masih perlu memperhatikan teknologi lama karena masih sangat berpengaruh terhadap kenyataan di dunia pendidikan sekarang ini.

G. FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM MEWUJUDKAN (KENYATAAN) MUTU PENDIDIKAN

- a. Fungsi : Perguruan tinggi swasta merupakan tempat untuk mengembangkan pengetahuan yang didasari agama, ideology, budaya yang saling interaksi dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Perguruan tinggi tidak hanya merupakan wahana integrasi ilmu pengetahuan, tetapi juga wahana persatuan bangsa seperti yang dikemukakan oleh Peter Drucker "Pengetahuan sebagai sumber kunci secara fundamental, tidak terikat satu negara dan dapat diciptakan secara cepat dan utuh"

- b. Tanggung jawab perguruan tinggi swasta dalam mewujudkan mutu pendidikan. Kegiatan perguruan tinggi

merupakan kegiatan yang netral dalam mengembangkan nilai-nilai moral bagi mahasiswa. Peserikatan bangsa-bangsa tanggal 8 Oktober 1998 meningkatkan perguruan tinggi agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan etika dan tatanan ilmiah, serta intelektual.
2. Mengutamakan usaha untuk membangun system akses demi keuntungan semua orang yang memiliki motivasi dan kemampuan.
3. Menggunakan otonominya dan standar akademik yang tinggi untuk mengembangkan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan yang diharapkan untuk masa depan, maka secara moral perguruan tinggi swasta mempunyai tanggung jawab secara multi disiplin dan transdisiplin dalam memberikan perhatian kepada:
 - a. Kualitas yang tinggi, kajian ilmiahnya, kepekaan sosial ekonomi, dan fungsi antisipasinya yang mempunyai dasar ilmiah
 - b. Kebutuhan akan hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi penelitian dan melaksanakan penelitian yang baik dan berguna bagi masyarakat.
 - c. Pengembangan system pendidikan menyeluruh dari berbagai perspektif pendidikan yang direkomendasikan untuk sasaran pendidikan baru.
4. Mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pelayanan kepada mahasiswa dan aktivitas masyarakat sekitar yang bertujuan mengurangi kemiskinan, kekerasan, buta aksara, angka kelaparan, serta berbagai jenis penyakit.
5. Menjalin hubungan dengan dunia kerja atas dasar yang baru yang melibatkan kemitraan kerja di berbagai perusahaan.

H. PENUTUP

Didalam menyelenggarakan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional tidak lepas dari keseluruhan hidup manusia dari berbagai aspek yaitu politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan kebudayaan, refleksi pendidikan yaitu peningkatan mutu melalui gerakan wajib belajar 9 tahun dilanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, peranan perguruan tinggi swasta merupakan mitra kerja perguruan tinggi negeri dalam menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi swasta cukup besar karena PTS bercita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perguruan tinggi swasta menjadikan harapan semua masyarakat dalam mewujudkan

mutu di pendidikan pada era pendidikan ini. Ada beberapa dimensi pendidikan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Akuntabilitas. 2. Relevansi 3. Kualitas 4. Otonomi Kelembagaan 5. Jaringan kerja sama, serta dimensi global mempunyai aspek yaitu kompetitif, kualitas dan mitra kerja.

Unsur kenyataan perguruan tinggi swasta mempunyai manfaat yang besar dalam mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi dalam hal ini tentang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Kenyataannya bahwa lulusan perguruan tinggi swasta bisa mampu mengabdikan kepada negara (PNS) juga menduduki jabatan yang sangat strategis memiliki prestasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atmadi dkk, 2000, Transformasi pendidikan, Universitas Semata Dharma, Yogyakarta
- H.A.R. Tilaar, 2000, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta
- H. Hadari Nawawi, Akhir Abad XX, Manajemen Strategi Organisasi non pratif bidang pemerintah, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- <http://www.depdiknas.go.id> Manajemen Pendidikan Masa Depan Eman Suparman
- J. David Hugger dan Thomas L. Weeller, 2003, Manajemen Strategis, Andi, Yogyakarta
- Pade Sidarta, 2000 Landasan Kependidikan Rineka Cipta
- PP No 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti, Jakarta
- Suyatno dkk, 2001 Strategi Pendidikan Nasional Majakarta Ohamka Pers
- UU No. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional